

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang memiliki arti dasar kuat, kekuasaan atau keberdayaan. Karena, orientasi yang paling pokok dalam pemberdayaan banyak bersentuhan dengan konsep serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat lemah, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, berkarya, dan terhormat, ia (pemberdayaan) memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti yang diutarakan oleh Suharto (2005:59-60) memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya.

Selain menunjukan kepada kemampuan, Suharto (2005:60) menyebutkan seseorang atas kekuasaannya, khususnya masyarakat rentan dan lemah, pemberdayaan juga memiliki kemampuan dalam beberapa aspek yang berpengaruh terhadap semua kalangan masyarakat diantaranya: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, sehingga masyarakat dikalangan bawah akan terasa lebih memiliki hidupnya yang layak.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Secara harfiah, Soetomo (2011:21) menjelaskan bahwa pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan (Anwas, 2016:48) Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada (Aritonang, 2001:1).

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Wrihantolo dan Dwidjowijoto (2007:2) bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Aspek tahapan tersebut (penyadaran, pengkapasitas dan pendayaan) mengarahkan kepada kekuasaan yang tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks

relasi sosial antara manusia. Konteks pemahaman kekuasaan diatas, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan akan terjadinya sebuah proses yang sangat tergantung kepada dua hal, diantaranya: *pertama*, kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. *Kedua*, bahwa kekuasaan dapat diperluas. Menurut Suharto (2010:57-58) Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Sedangkan menurut Kartasmita (2018:144) keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan dan potensi seseorang (individu) yang bersenyawa dalam kehidupan masyarakat. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat fisik serta mental, terdidik, dan kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Sedangkan menurut Mulyawan (2016:65) suatu proses motivasi, keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga masyarakat maupun sebuah organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas hidupnya.

Kemudian Suharto (2010:60) menyebutkan bahwa eksistensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.

### **2.1.2 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Menurut Parson (dalam Suharto, 2010:63) bahwa mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: a) Sebuah proses pembangunan bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c) Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1. Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3. Kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
4. Partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.
5. Kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

### 2.1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses menuju keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan yang terbuka, agar masyarakat lebih percaya diri dalam bersosial, memiliki kewibawaan yang setara dengan yang lainnya dan tidak menghindar dari kalangan masyarakat yang lainnya. Dengan berpegang pada prinsip pemberdayaan itu sendiri, program pemerintah daerah akan seutuhnya memyungi proses perjalanan pemberdayaan tersebut.

Penulis ngeutarakan bahwa Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati, Asmana, dan Suryadiputra, 2005) Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
2. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses

pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.
4. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel (Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 1999).

Kesimpulan pendapat dari pakar sosial, di antaranya Swift dan Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), Solomon (1976), Dubois dan Miley (1992) yang dikutip oleh (Fahrudin, 2009:18) terdapat beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain:

1. Empowerment adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai partner,
2. Proses empowerment melihat system klien sebagai pemegang peranan penting (competent) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber dan peluang-peluang,



3. Klien harus menerima dari mereka sendiri sebagai causal agent, yang mampu untuk mempengaruhi perubahan,
4. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup,
5. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya (Salomon,1976),
6. Jaringan sosial informasi adalah sumber pendukung yang penting untuk menyematani tekanan dan membangun kompetensi dan control diri,
7. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka artikulasi sendiri,
8. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*,
9. *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif,
10. Proses empowerment adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan, k) Empowerment dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

#### **2.1.4 Strategi dan Proses Pemberdayaan**

Menurut Gunawan (1996:100) secara fakta berbagai konsep dan program pemberdayaan masyarakat Sindangsuka Kec. Kawalu untuk mengentaskan/mengurangi kemiskinan, dan keterbelakangan sumber daya manusia telah banyak dilakukan oleh pemerintah desa setempat sebelumnya. Diantaranya terdapatnya program-program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dijabarkan melalui program pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus. Program-program yang dilakukan tersebut sifatnya top

down, sangat sentralistik, dan tidak banyak melibatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peran birokrasi dan intervensi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak negatif untuk kepentingan jangka pendek. Adanya realita negatif yang berkembang di masyarakat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi pembangunan serta “revitalisasi” atas konsep pembangunan.

Hal tersebut diutarakan oleh Safi'i, (2011:17) bahwa adanya berbagai rekomendasi yang dikemukakan seperti perlunya menciptakan kebijakan makro yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar serta mengurangi rigiditas birokrasi dan intervensi pemerintah dalam interaksi ekonomi. Selain itu, Soetomo (2011:25) menjelaskan bahwa diperlukan perubahan filosofi dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi, pola pembangunan dengan konsep *top down planning* menjadi *bottom up planning*, *uniformity* menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses pembelajaran, dan juga ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, dan *improvement* menjadi *transformation*.

Pelaksanaan konsep ini memerlukan reorientasi pembangunan, gerakan sosial, institusi lokal, dan pengembangan kapasitas. Hal ini didedikasikan kepada masyarakat untuk lebih mendapatkan kesempatan ikut serta dalam proses pembangunan sehingga setiap warga masyarakat harus “mampu” dan “berdaya”. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengedepankan keberanian mental masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya (Kusnadi, 2006:150). Faktanya pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Sementara itu pembangunan ekonomi kerakyatan harus diawali dengan usaha pengantasan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan bagi sebagian kelompok masyarakat.

Menurut Kusnadi (2006:143) Kemiskinan masyarakat merupakan salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan baik oleh berbagai pihak pusat (pemerintah). Dengan kecenderungan seperti itu, isu-isu pemberdayaan masyarakat masih tetap penting dan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan masyarakat. Walaupun upaya pemberdayaan masyarakat tidak mudah dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal, namun atmosfer otonomi daerah dan keterbukaan politik akan memberikan harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat tersebut.

Konsep *empowerment* (pemberdayaan), apabila dikaji lebih dalam maka akan melahirkan dua muatan dasar yang terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif (Riyadi, 2001:26). Asas positivisme lebih mengarah pada analisis kuantitatif seperti berikut: *Pertama, growth strategy*, di mana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada strategi pembangunan/ pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penghitungan *Gross National Product* (GNP) dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. *Kedua, employment program*, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja. *Ketiga, basic need strategy*, yang lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Sedangkan kajian pada asas interaktif, lebih mengarahkan pada pandangan pembangunan dengan analisis kualitatif seperti berikut: *Pertama, empowerment*, yang melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. *Kedua, sustainability*, yang melihat pada keberlanjutan pembangunan dengan memikirkan kelestarian alam dengan lingkungannya untuk dapat diwariskan pada generasi berikutnya. *Ketiga, approach technology*, yang diarahkan pada pembangunan dengan menggunakan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan.

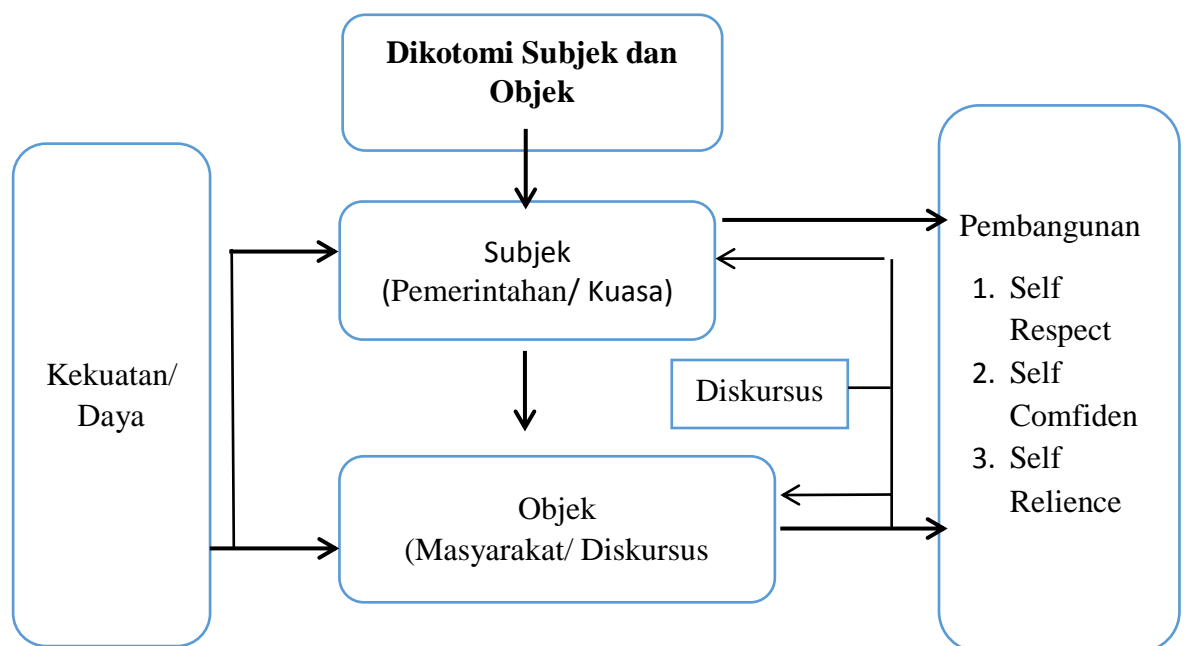
Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemerataan kesempatan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam hal persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajaran, serta tidak membeda-bedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama (Priyono 1996:73). Sedangkan menurut Hulme dan Turner dalam bukunya bahwa pemberdayaan (Hulme, David & Turner M. 1990:130) dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi antara lain:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi hal tersebut untuk

memperkuat keberdayaan/ kemampuan masyarakat dalam pendekatan sentrum of power, yang dilatar belakangi oleh kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.

2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik, dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka.

Dengan demikian, bila meminjam pernyataan Hulme dan Turner dalam karyanya, bahwa keberdayaan masyarakat sangat dibatasi oleh dikotomi subyek dan obyek. Dikotomi subyek dan obyek terjadi karena power (daya/kekuatan) yang mempengaruhi subyek dan obyek melalui kedekatan dengan *sentrum power*, sehingga kemampuan, status, kepemilikan, kedudukan dari masyarakat akan sangat bergantung pada power tersebut, semakin dekat masyarakat dengan *sentrum of power*, maka daya/kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat juga akan semakin banyak.



**Gambar 2.1 Dikotomi Subjek dan Ojek**

Sumber: Hulme, David & Turner M. (1990: 133)

Dari gambar di atas, menurut Hulme dan Turner perlu adanya diskursus antara pemerintah dengan masyarakat untuk bisa menentukan subjek dan obyek dalam pembangunan ekonomi / pemberdayaan masyarakat. Hal ini semestinya dapat dilakukan karena pada negara-negara berkembang ternyata pembangunan banyak didominasi oleh pemerintah sebagai kekuatan yang lebih dekat dengan sentrum kekuasaan. Bersumber pada hal tersebut, maka masyarakat/kalangan yang membutuhkan objek tersebut sebagai kelompok yang jauh dari sentrum kekuasaan akhirnya hanya berperan sebagai obyek pembangunan yang lebih banyak dikorbankan demi pembangunan. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya karena mereka tidak memiliki *self respect* (pengakuan diri), *self confident* (percaya diri), *self reliance* (kemandirian). Sehingga dengan demikian, masyarakat menjadi tetap miskin dan tidak berdaya. (Hulme, 1990:133).

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Menurut Suharto (dalam Alfitri, 2011) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu sebagai berikut:

1. Pemungkinan, Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
2. Penguatan, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini

meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Perlindungan, pemberdayaan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah (Mulyawan, 2016: 67).
4. Penyokongan, Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didtribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari- hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

Dengan demikian, aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan,

tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan

## **2.1.5 Teori Pemberdayaan**

### **2.1.5.1 Andragogi dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan ialah sebuah pengembangan secara menyeluruh seperti halnya pembangunan ekonomi masyarakat, apabila tujuan pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bukan sekedar pemenuhan kebutuhan primer dan materi, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus dapat menyentuh aspek perubahan kualitas. Untuk menjangkau perubahan kualitas sumber daya manusia tersebut, maka pendekatan pengembangan masyarakat harus menggunakan pendekatan pembelajaran masyarakat (andragogi) (Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VI, No. 1 Juni 2005:1-13 Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat: 9).

Sebagai sebuah pembelajaran (andragogi) maka pengembangan masyarakat penting untuk meletakkan asumsi perubahan yang syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai pendidikan atau pembelajaran, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kita tidak dapat merubah masyarakat secara langsung, akan tetapi hanya membantu masyarakat untuk merubah diri mereka sendiri. *Kedua*, perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan melakukan perubahan. *Ketiga*, orang akan termotivasi untuk melibatkan diri dalaam kegiatan pengembangan (belajar) apabila kegiatan pengembangan itu dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya, *keempat*, setiap orang dewasa mengharapkan agar mereka dapat mengarahkan perubahan diri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. *Kelima*, kegiatan pengembangan masyarakat hendaknya merupakan kegiatan yang menggembarakan, bukan hanya melibatkan tenaga fisik saja, tetapi juga melibatkan fikiran, perasaan, emosi, dan instuisi secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah menyangkut tentang:

1. Hubungan antara subyek pengembangan dengan masyarakat yang dikembangkan. Agar tujuan pengembangan dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka dalam kegiatan pengembangan, subyek yang mengembangkan seharusnya tidak bertindak sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada murid yang dalam hal ini adalah masyarakat. Akan tetapi lebih baik berperan sebagai pembimbing dan memberikan bantuan kepada subyek yang dikembangkan dalam memecahkan masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi.
2. Pengorganisasian materi pengembangan. Dalam pengorganisasian materi pengembangan masyarakat, subyek yang mengembangkan hendaklah memanfaatkan pengalaman subyek (masyarakat) yang dikembangkan dan mengikutsertakan mereka dalam merumuskan tujuan dan bentuk kegiatan pengembangan. Hal yang demikian, pada akhirnya, diharapkan membuahkan hasil yang memuaskan secara bersama-sama. Dengan melibatkan subyek yang dikembangkan dalam perumusan bentuk kegiatan pengembangan, maka akan meningkatkan prestasi dan kebersamaan. Psikologi Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia mengatakan bahwa; aktualisasi diri merupakan puncak kebahagiaan manusia.
3. Pemilihan dan penggunaan metode pengembangan. Banyak macam metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi pengembangan masyarakat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Metode apapun yang digunakan oleh subyek pengembangan, yang perlu sesekali diterapkan ialah bahwa kegiatan itu harus:



- a. Berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pengembangan masyarakat yang berangkat dari real needs (kebutuhan riil) masyarakat hasilnya akan segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Bukankah masyarakat yang dikembangkan adalah masyarakat yang nota bene adalah mengalami ketertinggalan karena kurang dapat akses terhadap kemajuan, oleh karena itu kesegeraan teratasi masalahnya merupakan suatu yang diharapkan mereka.
- b. Menuntut dan mendorong masyarakat yang dikembangkan berperan aktif.
- c. Mendorong masyarakat sebagai subyek yang dikembangkan berani mengemukakan pengalaman-pengalaman mereka, meski pengalaman pahit sekalipun.
- d. Menimbulkan kerjasama sesama mereka sebagai subyek yang sedang dikembangkan maupun antara mereka dengan subyek yang mengembangkan. Kerja sama ini akan terwujud jika semua pihak menyadari bahwa masalah yang sedang dicari jalan keluarnya adalah kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pengembangan dan pengembangan segelintir atau beberapa orang dari mereka.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Jurnal, Vol. 16 No. 01, 2011)

Kerjasama dalam sebuah pengembangan masyarakat dengan pendekatan andragogi dapat dilakukan dalam keseluruhan tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi: Menemukan masalah dalam masyarakat, menyusun perencanaan, merumuskan tujuan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan, mengevaluasi hasil (pemenuhan minat, kebutuhan, dan

pencapaian nilai-nilai). (5) Lebih bersifat pemberian dan atau penataan pengalaman mereka. Jika yang disampaikan dalam proses pengembangan tersebut adalah kegiatan praktek, maka subyek yang lakukan pengembangan hendaknya memilih metode yang menekankan pada perbaikan kualitas dan semangat kerja, peningkatan produktivitas kerja, ketepatan penggunaan alat dan pengembangan ketrampilan baru. (Jurnal, Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011).

Selain itu Soemardjan (1998:134) menyebutkan bahwa setiap tindakan yang diambil harus mempunyai sifat edukatif, dengan arti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan yang sekarang masyarakat belum mampu. Dengan demikian pelayanan kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat makin sedikit membutuhkan bantuan.

Kemudian Surjadi (1989:95) menjelaskan bahwa pendidikan orang dewasa harus bekerja dalam setiap cara untuk mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang informal di dalam masyarakat, menolong mereka tumbuh dewasa, mempersiapkan mereka untuk menerima tugas-tugas yang menantang, untuk menolong mereka melihat hubungan antara masalah-masalah mereka dan kelompok-kelompok lainnya dan menolong mereka memahami keuntungan mengadakan kerja di dalam memecahkan problem-problem masyarakat.

#### **2.1.5.2 Teori “Actors” Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (Sarah Cook dan Steve Macaulay, 1997:64) memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a) mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efisien; (g)

mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)

T= *trust* (keyakinan)

O= *opportunities* (kesempatan)

R= *responsibilities* (tanggung jawab)

S = *support* (dukungan)

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masya-rakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

1. *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;
2. *Confidence and competence*, me-nimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
3. *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
4. *Oppurtunities*, memberikan ke-empatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
5. *Responsibilities*, dalam melaku-kan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan

6. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya. Di negara-negara berkembang peranan pemerintah sangatlah penting karena pemerintah berperan: menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan faktor sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan masyarakat yaitu dengan menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, operasional, dan teknis; (2) pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for the community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with the community*), dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (*planning by the community*); dan (3) pemerintah dapat juga melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dapat berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan melakukan hal-hal lain guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

## **2.1.6 Impikasi dan Perubahan Sosial Masyarakat**

### **2.1.6.1 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Craig (dalam Hikmat, 2004) Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi

yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Partisipasi menurut Hoofsteede (dalam Khairuddin, 2000) berarti “*The taking part in one or more phases of the process*” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Sedangkan menurut Fithriadi (1997) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Sedangkan prinsip yang terdapat pada sikap partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dapat dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe (2005) dalam karyanya mengasumsikan bahwa hal yang menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Lebih lanjut Abe (2005) mengemukakan, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu: (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat

Menurut Kartasmita (1996:65) Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subjek dan objek. Secara garis besar proses ini melihat penting dan mengalirnya (*flow of power*) dari subjek ke objek dengan memberi kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumberdaya yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Sehingga mekanisme pemberdayaan dapat dilakukan

melalui membangun daya itu sendiri dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.

Seperti apa yang dikutip oleh Rahman Mulyawan (2016:93) bahwa ada hubungan pemberdayaan dengan partisipasi. Kemudian partisipasi menurut Davis (1962:242) adalah “*as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*”. Menurut Davis partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi atau peranserta sendiri memiliki pengertian sebagai berikut seperti apa yang di katakan *FAO (Food Agricultural Organisation)* dalam Mikkelsen (1989:1999:64) arti kata partisipasi adalah sebagai berikut:

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

1. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek proyek pembangunan.
2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Namun masih banyak pengertian lain dari partisipasi diantaranya: Koentjoroningrat (1994:79) menyatakan partisipasi masyarakat menyangkut dua tipe yaitu *pertama*, partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek

pembangunan yang khusus dan *kedua*, partisipasi sebagai keterlibatan seseorang/individu diluar aktivitas bersama. Sedangkan Thomas (dalam Syarwani,1987:66) menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat terutama sebagai gejala sosial yang dalam *dictionary of modern sociology* dapat dijumpai pada istilah *social relationship* yaitu suatu keadaan bahwa seseorang itu ikut merasakan bersama dengan orang lain sebagai akibat interaksi sosial. Selanjutnya menurut Siagian (1988:30) partisipasi masyarakat adalah mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan dimana rakyat yang akhirnya memegang peranan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Dilihat dari indikasi di atas, pengertian partisipasi atau peranserta secara operasional dapat diartikan sebagai keterlibatan secara nyata sejumlah orang di dalam situasi atau kegiatan yang dapat mempertinggi kesejahteraan secara sosial, ekonomi, pendapatan, keamanan atau rasa mempertinggi diri dan kepercayaan mereka. Wujud peran serta atau partisipasi secara aktif dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, akan membawa keuntungan kepada seluruh pihak sehingga hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi semakin konsisten dalam membangun masyarakat lebih sejahtera.

Secara fakta menurut Depdagri (1995) peran serta atau partisipasi masyarakat pada hakikatnya juga untuk mencari format bagaimana masyarakat ikut andil dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing mulai dari tahap perencanaan, pengalaksanaan, koordinasi, dan pengawasan, sehingga masyarakat berhak untuk mengungkapkan permasalahan dan kebutuhannya dalam tingkatn kesejahteraan. Meskipun dimungkinkan pula adanya masyarakat yang tidak menginginkan sikap peran aktif dalam seatu program pembangunan, kesejahteraan secara masal. Karena hal ini diliputi oleh beberapa aspek antara lain: pertama, masyarakat tidak ikutserta sejak penyusunan sebuah program perencanaan. Kedua, masyarakat kurang diberi kesempatan, peluang dan penghargaan terhadap partisipasi yang layak diberikannya. Ketiga, pemeran atau pelaku partisipasi dicurigai akan mengambil keuntungan pada proses kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat (Supriyanto, 2004:17). Soedarisman (2001) mengatakan untuk menciptakan hubungan pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat maka perlu mengedepankan sifat interaktif dan swakarsa masyarakat, namun untuk memperlancar sifat tersebut maka dibutuhkan syarat dan kondisi seperti, yaitu:

1. Adanya masyarakat yang berdaya, sehingga dapat berfungsi secara sosial, ekonomi, bahkan secara politik.
2. Adanya dialog yang setara antara seluruh stakeholders baik lembaga pemerintahan maupun masyarakat, sejak persiapan, pelaksanaan maupun pengendalian seluruh kegiatan.
3. Adanya kejelasan kewajiban, hak dan tanggung jawab seluruh stakeholders.

Dengan demikian, Moeljarto (1996) menjelaskan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya, upaya ini merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan unggul, sehingga pemberdayaan merupakan central theme atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Pembangunan manusia merupakan proses pembentukan kepercayaan diri dan kemandirian, yang dapat bekerjasama dan toleran terhadap sesamanya dengan menyadari potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya Holdar dan Zakharchenko (2002:17) mengemukakan beberapa unsur penting demi tercapainya partisipasi masyarakat yang konstruktif:

Inisiatif dan keinginan untuk membuat perbedaan, masyarakat mau berpartisipasi agar membuat perubahan-perubahan. Sangat sering inisiatif didukung oleh kedekatan dengan persoalan, dimana keputusan yang dibuat secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dedikasi terhadap persoalan, masyarakat harus sabar, komit terhadap persoalan dan tidak menyerah.

1. Pengetahuan tentang metode partisipasi masyarakat, semua stake-holders harus sadar akan metoda-metode partisipasi masyarakat, bagaimana mereka bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang tertentu.



2. Kesadaran dan atau pendidikan, masyarakat perlu didik tentang hak dan tanggungjawab dalam hubungan dengan pemerintah dan pengambilan keputusan.
3. Kerjasama dengan otoritas lokal, mereka yang berada dalam posisi kekuasaan harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, terbuka pikiran, memahami dan aktif.
4. Setiap stakeholder harus mendapat manfaat, masyarakat hanya akan aktif berpartisipasi dalam proses jikalau persoalan tersebut secara langsung mempengaruhi mereka atau akan keuntungan darinya, manfaat tersebut harus membantu masyarakat dan otoritas lokal.

#### **2.1.6.2. Pemberdayaan Melalui Penciptaan Masyarakat yang Kondusif**

Central utama dalam upaya menciptakan pemberdayaan masyarakat adalah terlahir dari dukungan, pemihakan dan pemberian kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat yang lemah dengan menciptakan suasana dan kehidupan yang memungkinkan potensi individu dalam masyarakat dapat terlaksana dan berkembang. Dalam hal ini pusat titik koordinasi pemberdayaan itu adalah pengenalan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat berkembang dan unggul. Artinya, bahwa tidak seorang individu pun yang tidak mempunyai daya sama sekali.

Menurut Suharto (2005:58) salah satu metode dan pendekatan yang efisien dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai keberhasilan yaitu dengan melalui pemberian bimbingan yang efektif dan dukungan penuh oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan roda peranan dan tugas-tugas kehidupan masyarakat lebih maksimal.

Upaya pemihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang lemah perlu dilakukan dalam berbagai sektor terutama sektor dalam bidang kebutuhan dasar masyarakat; kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan sosial, politik dll. Dan pemihakan ini disinyalir harus tidak ada keberpihakan dari pemerintah atau sumber-sumber kekuasaan kepada masyarakat lemah yang akan menimbulkan

asumsi negatif dan iklim yang bergejolak protes dari lapisan masyarakat yang secara ekstrim dapat berupa revolusi.

Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dapat dilakukan melalui pemberian dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan utama diberikan oleh pihak pemerintah dalam bentuk kebijakan pengurus utama pembangunan daerah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan tersebut harus dilaksanakan program-program nyata serta pengalokasian sumber daya yang benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga dapat membangkitkan atau menguatkan kepercayaan masyarakat dan berminat untuk mengembangkan program-program dalam rangka pemberdayaan diri masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian Bintoro (1976:170) menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian advokasi dan fasilitator dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan lembaga swasta memberikan dukungan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari usaha-usaha yang dijalankan perusahaan yang bersangkutan, sehingga sasaran utama dalam pembangunan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat yang menciptakan suasana kondusif, dapat dilakukan dengan mewujudkan perkembangan ekonomi yang tetap (*steady sosial economic growth*), melalui peningkatan produksi, kerajinan lokal dan potensi lokal, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan perbaikan lembaga ekonomi masyarakat daerah yang lebih menunjang pada kegiatan pembangunan. Dengan demikian terdapat kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah melalui program pemberdayaan.

Menurut Fellmann (2003:257) Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk merevolusi SDA (Sumberdaya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) suatu wilayah sehingga berguna dalam produksi barang dan berupaya melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang dan konsumsi, dengan demikian melalui pemberdayaan

masyarakat dapat menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam hal keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan, Heller (dalam Rich, 1995, p. 660) partisipasi akar rumput (*grass-root participation*) didasarkan pada inisiatif warga untuk memilih tujuan dan metoda mereka sendiri, sedangkan partisipasi mandat pemerintah (*governmentman dated participation*) yang melibatkan persyaratan hukum diberikan kesempatan bagi masukan masyarakat terhadap pengambilan keputusan (kebijakan) atau pelaksanaan sebuah lembaga.

Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif terkait dengan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun daerah, maka jenis kesempatan yang ada meliputi pendidikan, pelayanan, pemanfaat sarana dan prasarana. Sumber kesempatan diperoleh dari penanggung jawab pembangunan dengan dukungan masyarakat, yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan dukungan pelayanan kepada masyarakat yang mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun daerah melalui program pemberdayaan, maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan daerah.

Peran pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, dapat didalami melalui kesesuaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal yang selama ini berada dilingkungan masyarakat setempat. Disamping itu pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi dilakukan dengan menyesuaikan dengan keterampilan masyarakat yang ada dengan didukung oleh pengembangan potensi sumberdaya alam disekitar masyarakat.

Menurut Stewart (1998:2) Prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah, pinggiran dan perdesaan yang

memiliki kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, sikap kritis, dan taraf hidup yang rendah. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan juga untuk membebaskan masyarakat dari pembatasan-pembatasan yang memperlambat respon dan merintang kerja masyarakat dengan memilah seluruh peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, perintah-perintah dan sebagainya yang tidak perlu. Dengan demikian mendorong adanya minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat membentuk suasana kondusif kaitannya dengan menumbuhkan minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dapat diketahui dengan mengukur respon masyarakat dalam kesempatan yang diberikan melalui pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidupnya, disamping itu adanya minat masyarakat meningkatkan taraf hidup dapat didekati dengan wujud minat yang dilakukan oleh masyarakat baik melalui partisipasi secara mandiri maupun bersama-sama.

Menurut Bintaro (1976:47) Secara spesifik pembangunan sosial masyarakat daerah dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat daerah yang lebih kondusif terhadap pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bermasyarakat. Masyarakat yang kondusif lebih ditekankan pada pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif dengan memaksimalkan sumberdaya potensial yang ada di daerah.

### **2.1.6.3. Pemberdayaan Melalui Perlindungan**

United Nations Development Programme (UNDP) (2002) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Sementara menurut Undang-Undang 13 Tahun 2011, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemudian menurut Dwidjowijoto (2007:209) Pemberdayaan hadir untuk menjawab problematika kehidupan pembangunan ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat miskin, karena pemberdayaan terlahir dengan tujuan sebagai pelindung masyarakat yang lemah ekonomi ataupun orang-orang miskin. Melindungi yang lemah diperlukan akibat penguasaan aset produktif yang tidak seimbang antara kekuatan ekonomi besar dan sekelompok masyarakat yang tidak menguasai atau memiliki aset produktif.

Selain itu, Urata (2000:17) menyebutkan upaya perlindungan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat lemah dengan memberikan perlindungan kepada pelaku kegiatan ekonomi rakyat terutama dalam bentuk penetapan kebijakan dan aturan yang benar-benar melindungi masyarakat serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produksi masyarakat. Kebijakan yang bersifat perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat harus disertai pula dengan perbaikan sistem ekonomi yang melindungi pelaku ekonomi rakyat.

Menurut Dwidjowijoto (2007:207) Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan yang dilakukan dengan cara menciptakan iklim kondusif untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi (*enabling*) dan mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian upaya pemberian pemihakan harus memperhatikan keterpaduan antara pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya kepada seluruh Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan juga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat.

Peran aktif kedua belah pihak pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan dan penggunaan strategi manajerial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam rangka penegakkan peraturan, sedangkan pada sisi masyarakat adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan, serta dukungan langsung dalam proses pemberian perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Suharto (2005:58) salah satu strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar dapat berlangsung dan berhasil dengan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bimbingan dan dukungan dengan keberpihakan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupan sosial dan meningkatkan produktifitas kesejahterannya.

Selain itu, Yogi (2005:5) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan dukungan partisipasi dari masyarakat, dan mendapat dukungan pemangku kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, maupun dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum.

Seperti telah diintrodusir di muka, konsep pemberdayaan ini merupakan translasi dari *empowerment* yang berarti:

1. *Share the power*. Pengertian pemberdayaan dalam arti *share the power* terdapat tiga aliran pendapat: *Pertama*, bahwa upaya pemberdayaan berarti upaya untuk menghilangkan power atau kekuasaan itu sendiri sehingga tidak ada orang yang berdaya dan pada saat yang sama tidak ada orang yang tidak berdaya. Pengertian ini dikenal dengan istilah *power to nobody*. Pandangan ini merupakan nihilisasi terhadap kekuasaan yang ternyata tidak realistis. *Kedua*, bahwa upaya pemberdayaan berarti upaya untuk membagi power atau kekuasaan untuk semua orang secara sama rata, sehingga semua orang memiliki kekuasaan yang sama, tidak ada orang yang lebih berkuasa. Pengertian ini dikenal dengan istilah *power to everybody*. Pandangan ini berupaya untuk menghilangkan stratifikasi kekuasaan dalam kehidupan manusia, namun menjadi anarki karena tanpa norma dan etika bersama. *Ketiga*, bahwa upaya pemberdayaan berarti upaya untuk memberikan power

atau kekuasaan dari yang mempunyai kekuasaan kepada yang tidak mempunyai kekuasaan. Pengertian ini dikenal sebagai *power to powerless*. Pandangan ini dianggap paling realistis, fisibel dan aplikabel. (Pranarka dan Moeljarto, Pemberdayaan, dalam Prijono dan Pranarka, 1996).

2. *Delegation of authority*. Pemberdayaan/pendelegasian wewenang mengandung arti: *Pertama*, “Memindahkan tanggung jawab kepada staf garis depan”; *Kedua*, “Diperhitungkan di dalam keputusan”; *Ketiga*, “memberi kesempatan untuk menjadi seorang individu”; *Keempat*, “mengenai pemerataan di dalam organisasi”; dan *Kelima*, “Jauhkan keputusan dari para menajer dan biarkan orang-orang mengarahkan pe- kerjaannya sendiri-sendiri”. (Cook and Macaulay, perfect empow- erment, 1996). Empowerment adalah upaya memberikan power kepada kelompok masyarakat yang powerlessness.

### **2.1.7 Teori Kelompok Tani Ekonomi Masyarakat**

Menurut Homans (1950) kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Sedangkan menurut De Vito (1997) kelompok adalah sekumpulan individu yang berhubungan satu sama lain yang memiliki tujuan bersama dan adanya organisasi atau struktur diantara mereka dimana didalam kelompok dikembangkan norma-norma yang dianggap sebagai dasar berperilakunya anggota kelompok. Kemudian menurut Ibrahim (2017) kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas yang berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat sendiri dimana dibagi menjadi beberapa golongan misalnya kelompok profesi, aliran, bermain dan sebagainya. Menurut merton kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan sedangkan di dalam

kelompok tersebut terdapat rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama.

Menurut Scoot (1981) petani merupakan semua orang yang berdiam di pedesaan dan mengelola usaha pertanian serta yang membedakan dengan masyarakat adalah faktor pemilikan tanah atau lahan yang disandangnya. Kemudian Koentjaningrat memberikan pendapat bahwa petani yang hidup dari pertanian dengan teknologi lama, tetapi merasakan diri bagian bawah dari suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab dalam masyarakat kota. Menurut Sudiono (2010) petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan dan mengutamakan hasil laut. Selain itu, Sudiono (2010) membagi pertanian dalam dua golongan yaitu primitive dan modern. Dimana pertanian yang primitive diartikan sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari orang-orang tua dan tidak menerima inovasi. Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta dapat berinovasi dalam bidang pertanian sehingga petani modern dapat berkembang untuk ekonomi baik dibidang pertanian khususnya.

Menurut Pusat Penyuluhan Pertanian (2012) kelompok tani merupakan kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan usaha tani. Menurut Syahyuti (2007) kelompok tani adalah sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender. Kemudian menurut Hariadi (2011) kelompok tani didefinisikan sebagai sebuah lembaga di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisasikan para petani dalam menjalankan usahanya. Menurut Thomas (2008) kelompok tani pada hakikatnya adalah untuk menggerakkan sumber daya manusia petani dimana



pembinaan kelompok tani berperan dalam meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan petani. Selanjutnya menurut Djiwandi (1994) kelompok tani juga menjadi titik penting untuk menjalankan dan menerjemahkan konsep petani kedalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh dan pengembangan ke dalam langkah operasional.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Mendukung pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani lebah madu teratai dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sindangsuka. Penulis telah melakukan kajian pustaka yang relevan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk kelompok sebagai bahan perbandingan maupun rujukan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arwan Susilo (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Ternak Sapi Andini Seto Di Dusun Ngaliyan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul*" tahun 2007. Peneliti memahami bahwa skripsi tersebut membahas tentang pembinaan kelompok ternak sapi dalam hal cara pemeliharaan dan mengusahakan modal pinjaman bagi anggotanya. Dipaparkan dalam skripsinya bahwa bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok ternak sapi melalui pembinaan dan pinjaman modal dapat meningkatkan modal untuk menambah produksi ternak sapi. (Arwa Susilo, 2007: 82)
2. Penelitian yang dilakukan oleh tafrikhan (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa (KBMD) Telecenter E-Pebelan*" tahun 2009. Dalam skripsi ini membahas tentang pendampingan untuk peningkatan produksi pertanian melalui perencanaan, pelaksanaan

sampai pada paska panen dan pemberian peminjaman pemodalannya bagi petani. Proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara pendampingan di desa Pabelan tersebut cukup baik namun belum memuaskan dan peminjaman modal sangat bermanfaat serta tidak begitu membebani para petani. (Tafrikhan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa (KBMD) Telecenter E-Pabelan*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

3. Sukiman (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur Oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia Di Desa Jangkarang Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*" tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas tentang strategi pendekatan pengembangan dan strategi pemberdayaan yang digunakan untuk proses pemberdayaan kelompok tani Ngudi Makmur. Implementasi dari strategi yang digunakan melalui kegiatan beternak sapi, fermentasi jerami, pengembangan energi biogas, penghijauan lahan pesisir, pengikutsertaan dalam berbagai pelatihan, dan study banding. Dipaparkan dalam skripsinya bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat menambah pendapatan petani di desa Jangkarang. (Sukiman, *Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Ngudi Makmur Oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia Di Desa Jangkarang Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).
4. Khalila (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Oleh Kelompok Tani Suka Maju Di Dusun Gerinjang Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Madura*" tahun 2014.

Dalam skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki produksi pertanian padi dan peternakan Kambing Etawa melalui pendampingan kepada petani. Disebutkan dalam skripsinya bahwa melalui usaha ini dapat meningkatkan pendapatan petani karena hasil panen padi meningkat dan jumlah ternak kambing etawa juga meningkat namun masih ada kendala yang dialami yaitu persoalan modal yang terbatas, kesehatan, dan cuaca. (Khalila, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Oleh Kelompok Tani Suka Maju Di Dusun Gerinjang Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Madura*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

5. M. Dian Arifuddin (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Penanaman Padi Organik Yang Dipelapori Oleh BMD Amanah Di Maguwo Banguntapan Bantul Yogyakarta*” tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang proses BMD Amanah dalam melakukan pemberdayaan melalui dua langkah yaitu peningkatan modal dan peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan program pertanian padi organik. Melalui program tersebut BMD Amanah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah kemiskinan di dusun Maguwo. (M. Dian Arifuddin, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Penanaman Padi Organik Yang Dipelapori Oleh BMD Amanah Di Dusun Maguwo Banguntapan Bantul Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2009).
6. Penelitian berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Di Dusun Gondang Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2014-2015*”. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui kelompok tani

yang bernama Maju Makmur di dusun Gondang desa Campurejo kecamatan Tretep kabupaten Temanggung dengan program simpan pinjam, peternakan kambing, dan penanaman bibit. Objek penelitian skripsi ini kepada anggota kelompok tani yang merupakan petani tembakau.

### **2.3 Kerangka Teoretis**

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Setiap daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak daerah di Indonesia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Bagi masyarakat Sindangsuka Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kemiskinan, dan keterbelakang pendidikan ataupun kurang bermutunya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sudah sejak lama menjadi persoalan pemerintahan desa dan daerah Pempov Jabar, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Faktor tersebut banyak dipengaruhi dengan budaya, geografis dan nasib ekonomi keluarga serta lingkungan yang tidak produktif. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Jawa barat yang dilakukan BPS, jumlah penduduk di Tasikmalaya yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2019 tercatat menempati peringkat pertama di Jawa Barat yakni, menurut data tersebut 12 persen penduduk kota Tasikmalaya terkatagori hidup di garis kemiskinan (Tribun Jabar, 2020). Kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Dengan diresmikannya kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom pada tanggal 17 oktober 2001, mengandung konsekuensi logis adanya tuntutan

peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan tujuan pembentukan Kota otonom Tasikmalaya yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya.

Menurut Damanik (2019:172) Paradigma pembangunan kota ataupun daerah tidak hanya bermuka ekonomi. Ikhtiar meningkatkan pendapatan Nasional penting, namun tidak berjalan sendiri perlu disertai oleh adanya perombakan berbagai segi kehidupan masyarakat supaya pembangunan mampu meniadakan ketimpangan, mengurangi ketidak merataan dan menghalau kemiskinan absolut. Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggung jawab dan berkelanjutan dnegan melibatkan peran serta seluruh elemen warga masyarakat pembangunan ataupun pemberdayaan merupakan usaha merubah kondisi kehidupan, tingkat kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi lebih unggul dan baik.

Secara teoritis, upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat produktif, inovatif dan merancang sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui program-program untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan data terpadu. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan terobosan pembentukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor baik partisipasi, perlindungan, iklim yang kondusif dari pihak pemerintah daerah, lingkungan kondusif dan kebijakan perluasan kesempatan kerja (mengurangi tingkat pengangguran) serta memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Menurut teori andragogi, pengadaan program pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi dan perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan perubahan. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi, Pembentukan modal

memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat.

Kemudian Tampubolon (2003:40) menjelaskan proses pembentukan dan perhatian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan harus dirubah dengan pemberdayaan potensi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup, sumber daya manusia lebih cerdas, cermat dan rukun dengan lebih baik bagi seluruh lapisan dan warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri.

Premis dasar yang melandasi permasalahan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan jenis pendekatan penelitian yaitu deskriptif dan eksplanatori. Menurut Syah penelitian deskriptif adalah bentuk metode penelitian yang dipergunakan dalam proses penemuan pengetahuan yang luas terhadap objek penelitian pada rentang waktu peristiwa tertentu. Ditambah lagi, menurut Punaji Setyosari dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah bentuk studi dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan pendeskripsian mengenai kondisi, kejadian, objek yang diteliti, baik itu orang atau hal apapun terkait dengan variabel yang dapat dijelaskan baik melalui kata ataupun angka. Juga, hal yang senada disampaikan oleh Best, menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya untuk melakukan penggambaran dan interpretasi objek yang diteliti sesuai dengan kondisi apa adanya. Sedangkan penelitian eksploratif adalah suatu bentuk pendekatan penelitian dengan tujuan untuk menemukan informasi terkait suatu masalah atau topik yang belum diketahui atau dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti.

Jenis pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, mencoba untuk menemukan informasi secara relevan dengan menggunakan penulisan narasi dari hasil obeservasi, dan wawancara, dengan maksud pemberdayaan masyarakat

Sindangsuka dan mengeksplorasi implikasi dari pemberdayaan tersebut yaitu penumbuhan perekonomian sebuah masyarakat yang miskin, tidak edukatif dan kurang memiliki sumber daya manusia untuk mengembangkan lingkungan dan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan unggul baik secara proses maupun hasil yang diperoleh oleh masyarakat Sindangkasih Kec. Kawalu, maka dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat menjadi program yang unggul agar kemampuan proses penumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat, dan juga hal yang mendasar dari pengembangan ekonomi masyarakat berupaya memperbaiki ekonomi masyarakat dengan membantunya agar berfungsi lebih efektif dalam tatanan ekonomi yang ada. Tatanan ekonomi merupakan sebuah problem dan dalam jangka waktu yang panjang tidak dapat berkelanjutan yaitu tidak semua masyarakat dapat berharap untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Chambert (dalam Iffendy, 2008, p.42), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “People-centered”, participatory, dan empowering. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Pemberdayaan Ekonomi dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Selain itu, Effendy (2002:314-315) Strategi dan upaya memberdayakan masyarakat Sindangsuka Kec. Kawalu dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Dimensi pemberdayaan masyarakat seperti halnya menurut Effendy dalam bukunya mengandung makna tiga pengertian yaitu enabling, empowering, dan maintaining sebagai berikut.

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang

berkesinambungan. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.

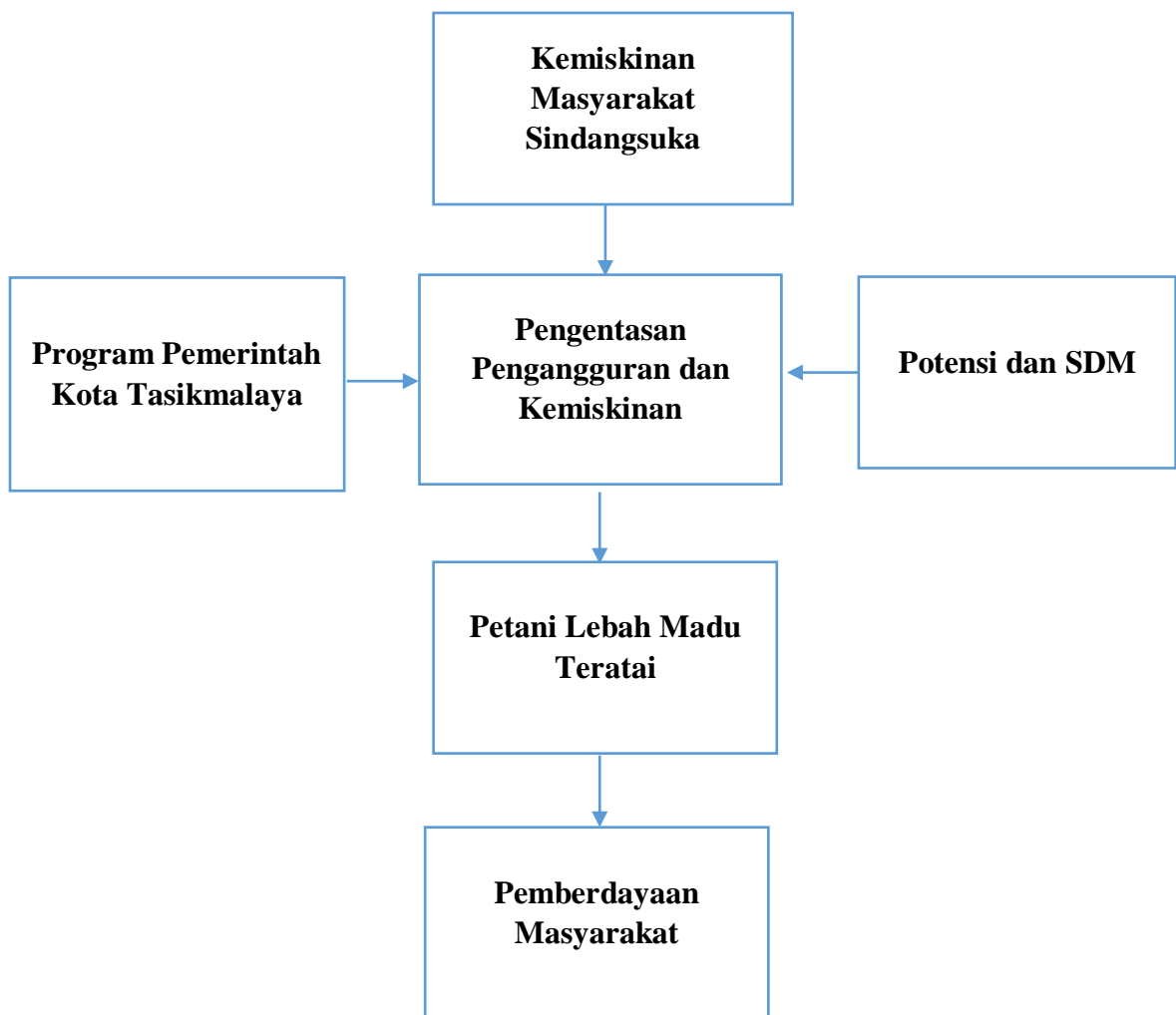
2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi dalam program unggulan tersebut bertujuan agar masyarakat Sindangsuka merasakan kehidupan yang sejahtera, dapat perlindungan dan tidak ditindas dengan iklim yang memaksa mereka untuk lemah. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Dengan demikian, untuk melancarkan program tersebut maka, pemerintahan daerah kec. Kawalu mengajukan sebuah pemberdayaan masyarakat dengan melalui kelompok tani lebah madu teratai sebagai program unggulan mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang melanda pada masyarakat Sindangsuka.

Menurut Edy (2009) kelompok tani dan ekonomi masyarakat memiliki kaitan erat, dimana kelompok tani lebah madu sebagai aktor dalam menyukseskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin, kegiatan usaha



sampingan memiliki peranan yang penting sebagai salah satu strategi dalam mencukupi keberlangsungan perekonomian masyarakat petani. Intensitas anggota masyarakat yang melakukan kegiatan usaha sampingan akan menentukan besarnya kontribusi terhadap total pendapatan masyarakat petani. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari usaha lebah madu akan memberikan kontribusi bagi pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lebah madu.



**Gambar 2.2 Kerangka Teoretis**